

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perparkiran merupakan sebuah masalah yang sering ditemui dalam sistem transportasi, khususnya untuk kendaraan angkutan barang (truk). Masalah perparkiran tersebut sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat beraktivitas tinggi maka laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir pada bahu jalan, sehingga dapat menyebabkan kemacetan (Sholikhin dan Mudjanarko, 2017).

Kota Makassar merupakan kota yang semakin padat dan ramai akan transportasi, akibat dari keramaian ini lalu lintas di Kota Makassar mengalami kemacetan. Kondisi yang terjadi diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat yang memarkir kendaraannya pada bahu jalan, penataan kendaraan yang bermuatan berat yang kurang efektif, dan aktivitas bongkar muat kendaraan bermuatan berat juga tidak tersentralisasi (Maryam dkk, 2021). Dampak dari kemacetan tersebut membuat laju kendaraan melambat atau bahkan berhenti, kondisi ini membuat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami peningkatan dikarenakan mesin kendaraan yang menyala lebih lama yang mengakibatkan pengemudi harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk pembelian BBM dan masyarakat yang bekerja juga kehilangan jam kerja karena terlambat ke kantor atau perusahaan yang akhirnya membuat pendapatannya juga turut berkurang (Edison, 2017)

Ada banyak titik macet di Kota Makassar, salah satu titik macet terletak di depan SMP Nasional mengalami perlambatan kendaraan hingga depan Bursa

Cakar karena pengantaran anak sekolah dan juga terdapat anak sekolah memarkirkan kendaraan di depan Bursa Cakar yang menempati bahu jalan karena tidak adanya area parkir bangunan tersebut (Andi Halim, 2016). Kasus yang sama juga terjadi pada ruas jalan Arief Rate, yang terpantau padat merayap, pada ruas jalan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang cukup padat seperti salah satu daerah perkantoran, pusat pendidikan dan pertokoan serta lokasi yang cukup dekat dengan Mall Ratu Indah, kondisi lalu lintas yang tidak lancar terlihat lumpuh karena kemacetan yang terjadi, banyaknya kendaraan penjemputan anak sekolah yang memadati Jalan sehingga menyebabkan kemacetan (Maryam dkk, 2019).

Fenomena di atas juga menjadi masalah di Kecamatan Wajo dari hasil pengamatan peneliti, sejumlah ekspedisi di Kecamatan Wajo belum menyediakan lahan parkir yang representatif, dapat ditemukan banyaknya truk yang parkir dan bongkar muat barang di badan jalan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No.17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam pasal 9 ayat (1) dikatakan “dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan”. Masalah transportasi truk di Kecamatan Wajo telah berada pada kondisi yang cukup memprihatinkan dimana banyaknya pengemudi truk yang tidak peduli terhadap prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Makassar. Terdapat ketidaksesuaian antara prosedur parkir dengan realita di lapangan. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lain yang menimbulkan masalah kemacetan, kecelakaan, jalan berlubang, polusi udara, serta penggunaan sarana dan prasarana. Adapun hasil pengumpulan data hasil observasi lapangan dapat dilihat pada gambar berikut

**Gambar 1**  
**Kemacetan Pada Wilayah Kecamatan Wajo**



Sumber : Data Primer. 2023

Pada gambar diatas menunjukkan truk yang parkir dibadan jalan menyebabkan kemacetan dan kepadatan di Jalan Doktor Wahidin Sudiro Husodo, Kecamatan Wajo pada sore hari Pukul 15.53 Wita. Tidak hanya itu, pada jalan tersebut juga melakukan aktivitas bongkar buat barang pada bahu jalan, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya lahan parkir khusus, yang membuat para pelaku usaha ekspedisi ini memanfaatkan bahu jalan sebagai area bongkar muat barang. Observasi yang dilakukan juga melihat masih terdapat banyak truk parkir pada bahu jalan yang telah menyalahi aturan serta mengganggu sarana dan prasarana.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Makassar telah melakukan pertemuan dengan pihak ekspedisi dan Kecamatan Wajo. Pembagian brosur juga dilakukan oleh Kecamatan Wajo untuk menertibkan para pihak ekspedisi, yang melakukan parkir serta bongkar muat barang yang sesuai dengan aturan berlaku jadi dapat dikondisikan pada jam tertentu tidak mengalami kemacetan kendaraan artinya tidak terlalu padat, tetapi sampai sekarang pihak ekspedisi belum merespon hal tersebut. Pemerintah Kota Makassar juga telah mengeluarkan

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum daerah kota makassar, dalam aturan tersebut telah dijelaskan bagaimana seharusnya pengelolaan parkir, namun pada implementasinya masih banyak pihak ekspedisi yang melanggar aturan tersebut. Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perhubungan yang notabenenya hanya sebagai pihak ketiga yang hanya mengeluarkan izin teknis parkir. Ruas jalan tersebut tidak termasuk dalam 5 ruas jalan nasional yang berada dalam area bebas parkir. Lembaga lain seperti PD Parkir yang mengelola ditepi jalan juga sama sekali belum melakukan tindakan signifikan yang mengakibatkan masih banyak perusahaan ekspedisi memakai badan jalan melebihi batas tepi parkir di pinggir jalan. Kurangnya koordinasi dari pihak-pihak yang terkait membuat masalah ini terus berlanjut. Pihak yang dimaksudkan direksi yang berwenang kepada pihak ekspedisi atau pihak direksi kepada masyarakat sebagai pengguna jalan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis kebijakan yang berlaku dan memberikan alternatif kebijakan dalam bentuk sesuai dengan judul penelitian yang diangkat yaitu “Analisis Kebijakan Parkir Truk Ekspedisi Kecamatan Wajo.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi kebijakan dalam pengelolaan parkir truk ekspedisi di tepi jalan pada Kecamatan Wajo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi kebijakan dalam pengelolaan parkir truk ekspedisi tepi jalan pada Kecamatan Wajo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dan para pemilik ekspedisi. Kemudian diharapkan dapat menjadi acuan kepada pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan angkutan truk dalam upaya meminimalisir perlambatan lajur kendaraan sehingga memberikan efek positif terhadap pergerakan ekonomi sekitar.